



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**SURVEI PERWUJUDAN
GOOD GOVERNANCE
DAN PEMENUHAN LIMA PILAR
SISTEM TATA PAMONG**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum. Wr.wb.

Salam sejahtera kami sampaikan bagi kita semua, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan hasil analisis kami dalam laporan kajian mengenai “**SURVEI PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PEMENUHAN LIMA PILAR SISTEM TATA PAMONG**” yang telah kami susun. Tentu hasil kajian kami, berdasarkan kondisi objektif dan berdasar pada analisis kajian hukum dan ekonomi yang berlaku, dengan tidak mengesampingkan kondisi objektif yang ada di lapangan.

Terakhir kami sampaikan, terimakasih atas seluruh narasumber dan pihak terkait yang telah memberikan informasi, sehingga kajian ini telah menjadi kesatuan yang utuh, meski kami pun yakin masih dimungkinkan ada kekurangan pada laporan ini. Mudah-mudahan laporan kajian ini, dapat turut serta membantu Fakultas dalam melakukan evaluasi melalui rekomendasi yang diberikan, Sehingga dapat memberikan sumbangsih yang rill pada peningkatan kualitas pelayanan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb

Bandung, Maret 2021

Hormat Kami,

Tim Kajian

BAB I

PENDAHULUAN

Tata pamong atau *governance* memiliki makna bagaimana sebuah organisasi dapat mempergunakan kewenangan dan kekuasaannya, serta mengelola sumberdaya yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka untuk mencapai tujuan besar yang telah ditentukan. Konsep tata pamong ini perlu dipahami tidak hanya sebagai sebuah struktur Lembaga/institusi, melainkan yang lebih pokok adalah bagaimana proses bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya.

Pada praktiknya, sistem tata pamong berkaitan dengan kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Dalam hal ini, tata Pamong pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance*, yang menjamin terselenggaranya praktik-praktik yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara professional, serta mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan UPPS harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan.

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam UPPS. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan hadirnya dan tegaknya regulasi, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Sistem Tata pamong Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi,

mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran lainnya. Dengan demikian, terdapat lima pilar utama dalam sistem tata pamong Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil. Penjelasan dari kelima pilar tersebut, adalah:

1. Kredibel

Kredibel bermakna UPPS merupakan lembaga pendidikan sarjana yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Bukti adanya kredibilitas dari sistem tata pamong UPPS, adalah: a) Dosen yang kompeten, lulusan Universitas dalam dan luar negeri, b) UPPS dipimpin oleh Dekan dan Wakil Dekan yang memiliki high performance, c) UPPS menerapkan berbagai aturan yang berlaku di lingkungan civitas akademik, dan d) Sumber daya dosen UPPS dilibatkan dalam berbagai macam proyek atau kegiatan mitra kerjasama baik itu dalam Institusi Pemerintahan, Sektor Swasta, maupun Organisasi Kemasyarakatan.

2. Transparan

Transparan bermakna UPPS merupakan sebuah Lembaga dengan sistem pengelolaan yang memungkinkan dan memberi kesempatan civitas akademika UPPS untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya publik. Bukti adanya pengelolaan UPPS yang transparan, yaitu dengan adanya pertemuan yang secara rutin dilaksanakan oleh UPPS, dalam mendiskusikan beberapa hal terkait dengan: a) keterbukaan dalam rekrutmen dosen, b) keterbukaan dalam rekrutmen mahasiswa, c) keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya, d) pengelolaan akademik yang terbuka dan bertanggung jawab, dan e) forum musyawarah secara periodik untuk melakukan monitoring, evaluasi dan dengar pendapat.

3. Akuntabel

Akuntabel bermakna pengelolaan UPPS dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan non-akademik, yang dijelaskan sebagai berikut: a) Akuntabilitas akademik dicapai dengan penilaian eksternal dari Auditor Mutu Akademik dalam Program Audit Mutu Internal (AMI). Program audit dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Gunung

Djati Bandung bersama Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; b) Akuntabilitas non akademik (keuangan) diawasi secara internal oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kemudian, secara operasional, Dekan, Wakil Dekan bidang Akademik, dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas melakukan kegiatan sistem penjaminan mutu akademik

4. Tanggung jawab

Responsibilitas/tanggung jawab, bermakna bahwa UPPS mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, umat manusia, masyarakat, bangsa dan Negara untuk bekerja sebaik-baiknya. Tanggung jawab ini dilakukan antara lain dengan cara:

- a) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), yang dilakukan secara berkelanjutan dan selalu diadakan evaluasi untuk dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan, sehingga tercapai peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik secara kuantitas dan kualitas.
- b) Tersedianya pedoman perilaku/kode etik bagi dosen, berdasarkan Peraturan Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Peraturan kode etik dosen di lingkungan FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- c) Tersedianya pedoman perilaku/kode etik bagi mahasiswa berdasarkan Peraturan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Peraturan kode etik Mahasiswa di lingkungan FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- d) Tersedianya pedoman perilaku/kode etik bagi tenaga kependidikan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- e) Tersedianya buku pedoman akademik.

5. Adil

Adil bermakna segenap aspek akademik dan non-akademik telah dikelola sebaik-baiknya secara selaras, serasi dan seimbang. Keadilan yang dikembangkan di UPPS adalah keadilan yang obyektif menurut peraturan perundangan yang berlaku. Atas perihal yang belum diatur dalam peraturan perundangan, Ketua UPPS mengupayakan sejauh mungkin untuk

mendasarkannya pada niat dan itikad baik. Keadilan dalam pengelolaan dilaksanakan dengan cara:

- a) Perencanaan, implementasi dan evaluasi kegiatan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- b) Musyawarah untuk mufakat dengan semangat kekeluargaan atas manajemen operasional Fakultas.
- c) Pengaturan dosen UPPS dalam hal *Staffing* untuk menentukan tenaga pengajar dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja dosen yang bersangkutan,

Pembimbing praktikum, magang, dan skripsi dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja dosen yang bersangkutan. Terkait dengan pembimbingan magang dan skripsi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih tema sesuai dengan minat mahasiswa, dan Program studi lanjut dan pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki 2160 mahasiswa, 68 dosen, dan 21 Tenaga Kependidikan. Berdasarkan jumlah populasi tersebut, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah melalui metode Isaac dan Michael melalui pencocokkan jumlah responden dengan tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5%. Dengan demikian, jumlah sampel mahasiswa yang dipilih adalah 301 responden, dosen sebesar 58 responden, dan tenaga kependidikan sebanyak 23 responden.

B. Waktu Pelaksanaan

Survei perwujudan *good governance* dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini dilakukan selama dua bulan penuh mulai dari November hingga Desember tahun ajar 2020/2021. Penyebaran angket ini dilakukan secara daring. Penyebaran angket dan pengumpulan jawaban responden dilakukan oleh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket secara online melalui *google form* kepada Mahasiswa Aktif, Dosen Tetap, dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Adapun isi kuesioner ini terdiri dari 5 dimensi yaitu 1) kredibilitas, 2) transparansi, 3) akuntabilitas, 4) responsibilitas dan 5) keadilan.

1. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Uji Validitas

Untuk mencari validitas sebuah item, perlu dikorelasikan antara skor item dengan total item-item tersebut. Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas dengan teknik korelasi *product moment pearson*, yaitu:

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Dimana :

- r = koefisien korelasi *pearson product moment*
- n = jumlah responden
- $\sum X$ = jumlah skor X
- $\sum Y$ = jumlah skor Y
- $\sum XY$ = jumlah hasil kali skor X dan Y
- $\sum X^2$ = kuadrat jumlah skor X
- $\sum Y^2$ = kuadrat jumlah skor Y

Semakin besar validitas suatu alat ukur, maka alat ukur tersebut semakin mengenai sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Karena di dalam pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, maka pertanyaan-pertanyaan yang disusun pada kuesioner tersebut harus dapat mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Syarat minimum untuk dianggap suatu butir instrument valid adalah nilai indeks validitasnya $\geq 0,3$ (Sugiyono, 2016). Oleh karena itu, semua pernyataan yang memiliki tingkat korelasi dibawah 0,3 harus diperbaiki karena dianggap tidak valid.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Reliabilitas menggunakan rumus Alfa Cronbach dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_x^2} \right]$$

Dimana :

- α = reliabilitas instrumen
- k = banyaknya butir pertanyaan
- $\sum S_i^2$ = jumlah varians tiap butir pertanyaan
- S_{total}^2 = total varians

Koefisien Alfa Cronbach merupakan statistik yang paling umum digunakan untuk menguji reliabilitas suatu instrumen penelitian. “Cronbach’s Alpha” adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Cronbach’s Alpha dihitung dalam rata-rata interkorelasi antar item yang mengukur konsep. Semakin dekat Cronbach’s Alpha dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal.

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Sekaran (2012), “suatu instrumen penelitian diindikasikan memiliki tingkat reliabilitas memadai jika koefisien Alfa Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,70”. Apabila korelasi 0,7 maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi dibawah 0,7 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel (Sugiyono, 2012).

2. Skala Likert

Tanggapan responden atas setiap item pertanyaan diukur menggunakan skala Likert, dengan kriteria sebagai berikut:

Tanggapan	Predikat
Sangat Baik	4
Baik	3
Cukup	2
Kurang Baik	1

Data yang diperoleh akan ditabulasi sesuai dengan pilihan jawaban responden dan dilanjutkan dengan perhitungan indeks kepuasan Lembaga Mitra (IKLM) melalui perhitungan rata-rata skor jawaban responden sesuai dengan item pertanyaan, dengan rumus:

$$IKPM = \frac{\sum n * Si}{N}$$

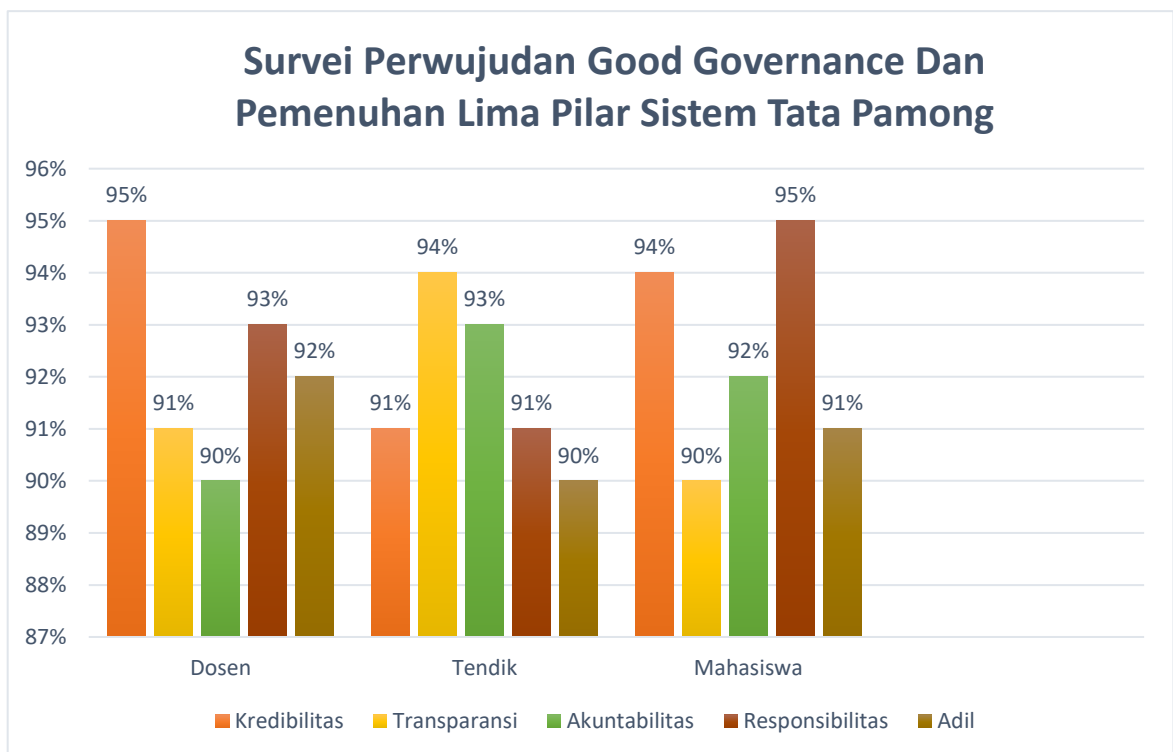
Di mana: Si = Skor item pertanyaan masing-masing aspek; n = Predikat item; dan N = Jumlah responden

IKPM	Predikat
≥ 3.25	Sangat Baik (Sangat Puas)
2.50 – 3.24	Baik (Puas)
1.75 – 2.49	Cukup
1.00 – 1.74	Kurang Baik (Tidak Puas)

BAB III

HASIL SURVEI

Untuk mengevaluasi perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maka isi angket akan berdasarkan pada 5 dimensi utama yaitu 1) kredibilitas, 2) transparansi, 3) akuntabilitas, 4) responsibilitas dan 5) keadilan. Hasil survey berupa data angket diolah secara statistik deskriptif yang diperoleh dari setiap kelompok responden yaitu: Mahasiswa aktif, Dosen Tetap, dan Tenaga Kependidikan.



Berdasarkan pada grafik di atas, pertama yaitu terkait dengan kredibilitas sistem tata pamong FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dapat dilihat bahwa tenaga dosen sebanyak 95%, lalu untuk tenaga kependidikan sebesar 91%, dan dari kalangan mahasiswa sebesar 90% telah memberikan penilaian sudah kredibel. Dengan demikian, secara mayoritas civitas akademika FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung berpandangan bahwa sistem tata pamong institusi lembaganya sudah menunjukkan kredibilitas yang baik.

Selanjutnya yang kedua perihal transparansi sistem tata pamong, civitas akademika FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari kalangan dosen sebanyak 91%, tenaga kependidikan 94%, dan mahasiswa 90% menilai sudah menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi. Sehingga dapat dimaknai bahwa, FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai sebuah Lembaga Pendidikan telah memungkinkan dan memberi kesempatan civitas akademiknya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Kemudian yang ketiga, di mana civitas akademika FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari tenaga dosen sebanyak 90%, tenaga kependidikan 93%, dan mahasiswa 92% menganggap bahwa akuntabilitas sistem tata pamong lembaganya sudah berjalan dengan baik. Ini memiliki arti bahwa pengelolaan FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara akademik maupun non-akademik dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Adapun pada dimensi keempat, yaitu responsibilitas, data menunjukkan bahwa tenaga dosen sebesar 93%, tenaga kependidikan 91%, dan mahasiswa 95% menilai bahwa sistem tata pamong FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung sudah memiliki tingkat responsibilitas yang tinggi. Hal ini memiliki implikasi bahwa bahwa FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah mampu bekerja dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan kegiatan akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dimensi terakhir, yaitu keadilan, di mana civitas akademika yang terdiri dari kalangan dosen sebesar 92%, tenaga kependidikan 90%, dan mahasiswa 91% memberikan penilaiannya bahwa sistem tata pamong FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung sudah menunjukkan sikap dan tindakan yang adil. Hal tersebut bermakna bahwa segenap aspek akademik dan non-akademik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah dikelola sebaik-baiknya secara selaras, serasi dan seimbang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil survei telah menunjukkan bahwa setiap dimensi perwujudan *good governance* dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah mendapatkan penilaian dan pengakuan

yang sangat baik oleh civitas akademika baik oleh dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan. Meskipun demikian, jajaran Fakultas masih berupaya untuk terus memperbaiki bagian-bagian dari dimensi *good governance* dan pilar sistem tata pamong FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung kedepannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan Survei, dapat disimpulkan bahwa segenap sivitas akademika FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang terdiri dari tenaga dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, memberikan penilaian bahwa perwujudan *good governance* dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menunjukkan tingkat kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan yang tinggi dan baik.

B. Tindak Lanjut

Sebagai upaya optimalisasi dan peningkatan perwujudan *good governance* dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maka akan disusun berbagai langkah strategis/program yang dapat diselenggarakan. Pertama, yaitu peningkatan kualifikasi serta pengalaman tenaga pendidik dalam dunia internasional. Kedua, yaitu peningkatan pemberian informasi secara lebih cepat dan tepat terkait dengan kegiatan akademik civitas akademika. Ketiga, yaitu UPPS secara kontinu bisa melakukan *appraisal* lebih aktif terhadap sistem akademik/non-akademiknya. Keempat, yaitu secara konsisten dapat terus meningkatkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang lebih kolaboratif antar civitas akademika. Kelima, yaitu setiap civitas akademika bisa mendapatkan kesempatan sama untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan karier akademiknya yang lebih baik dan berkemajuan.